Parlementaria



3 Pentingnya Perlindungan Bagi Semua Jenis Buruh



Apresiasi Masyarakat Gorontalo Terhadap **Program Bantuan Presiden**



Dialog Multilateral, Redam Konflik di **Timur Tengah**



Perubahan Istilah KKB ke OPM **Diharapkan Atasi** Konflik di Papua

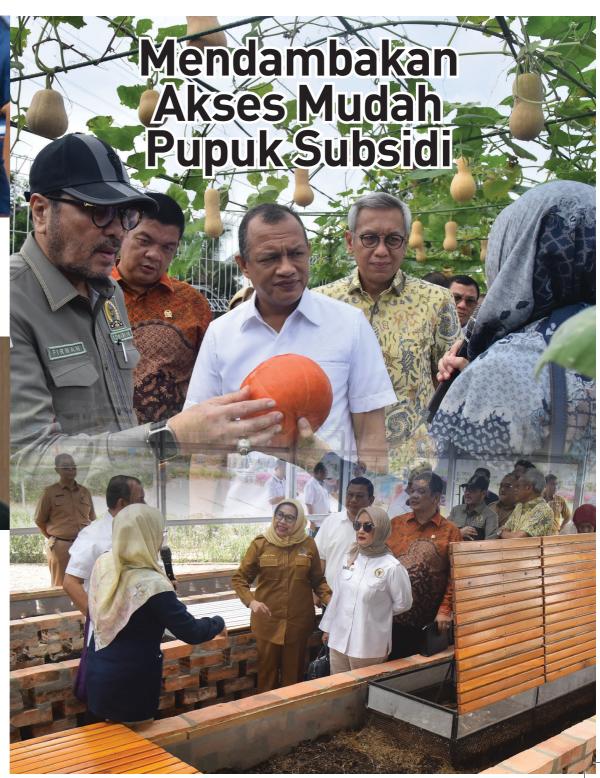












Mendambakan Akses Mudah Pupuk Subsidi

nggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mengapresiasi program pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah. Hanya saja, ia menyayangkan masih ada daerah yang kesulitan mengaksesnya. Sementara itu, sosialisasi terkait penjualannya dirasa kurang. Sebagai contoh, terdapat kios pupuk ada yang menjual pupuk subsidi yang membuat masyarakat resah.

"Kurang adanya sosialisasi mengenai pupuk bersubsidi sehingga para petani masih sulit mendapatkan pupuk tersebut, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah hadir memberikan jalan keluar dengan memberikan sosialisasi bagi para petani," jelasnya usai melakukan kompleks Pusri Agro Edupark, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Sumatera Selatan, Senin (20/4)

Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan tujuan program pupuk



Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (29/4/2024).

bersubsidi tidak akan tercapai jika petani tetap miskin. Pasalnya banyak persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, yakni fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa dengan baik diperoleh para petani.



Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan menyambut baik penambahan kuota pupuk bersubsidi yang semula hanya 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Penambahan tersebut mendapatkan apresiasi meskipun di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani masih diperlukan 12 juta ton.

Sehingga, meskipun masih terdapat kekurangan tiga juta ton, namun ia menilai peningkatan yang terjadi di tahun 2024 sudah signifikan. "Diharapkan penyaluran pupuk bersubsidinya yang beralih dari melalui T-Pubers ke aplikasi iPubers sudah selesai di dalam memadupadankan datanya. Sehingga, petani nanti bisa hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bisa tebus pupuk," tukasnya.



(ETUA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pentingnya Perlindungan Bagi Semua Jenis Buruh



Ketua DPR RI Puan Maharani.

FOTO: FNO/PDT

etua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya perlindungan bagi semua jenis buruh dalam Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Pada momen May Day 2024, ia juga mendorong terciptanya keadilan untuk semua buruh di Indonesia.

"Perlindungan dan keadilan bagi buruh harus menjadi perhatian kita bersama. Karena buruh atau pekerja memiliki peran besar untuk negara. Bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, buruh juga merupakan pelaku utama pembangunan," kata Puan dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2024, Rabu (1/5).

la menilai, perlindungan terhadap buruh sangat penting di tengah banyaknya tantangan global saat ini. Salah satu yang menjadi perhatian Puan adalah mengenai tingkat pengangguran global yang kian mengkhawatirkan.

"Untuk menyelesaikan pengangguran di Indonesia yang masih cukup tinggi perlu kerja bersama seluruh stakeholder terkait, terutama Pemerintah. Jika tidak ada perbaikan, jumlah pengangguran yang terus meningkat dapat menjadi masalah pembangunan yang serius," tuturnya.

Meningkatnya jumlah pengangguran secara umum disebabkan oleh adanya pertumbuhan jumlah ketersediaan kesempatan kerja yang tidak bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang terus semakin bertambah. --- aha





PENGAWAS UMUM

KETUA PENGARAHIr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.IP., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website) gus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media) Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

Anton Noton Natival Kandardinina, A.Mol.S ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Ko Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom, Roh, Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom, Roha, betyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie,
Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA Supian, S.E., Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Suanya, Fahmi Harfa, Saftiri Restu Midyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFISDito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Apresiasi Masyarakat Gorontalo Terhadap Program Bantuan Presiden

residen RI Jokowi belum lama ini menggelar kunjungan kerja ke Gorontalo untuk meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato, panen jagung di Pohuwato, meninjau pembangunan Waduk Bulango Ulu, serta sejumlah agenda lainnya. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan apresiasi dan terima kasih dari masyarakat kepada Presiden yang telah menggelontorkan berbagai program bantuan dan proyek strategis nasional ke Provinsi Gorontalo.

"Alhamdulillah bisa menyambut kedatangan beliau (Jokowi) bersama rombongan yang akan melakukan kunjungan kerja serta beberapa agenda lainnya di Gorontalo. Semoga Gorontalo memberikan kesan yang indah bagi Pak Presiden," ungkap Gobel dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Selasa



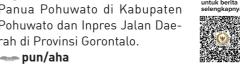
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat berbincang dengan Presiden RI Jokowi yang baru tiba di Bandara Djalaludin, Gorontalo, Minggu (21/4/2024)

(23/4) sebagaimana perbincangan santai keduanya saat Jokowi tiba di Bandara Dialaludin, Gorontalo, Minggu (21/4).

"Begitu banyak program yang

telah diberikan Presiden Jokowi untuk Gorontalo, diantaranya Proyek Strategis Nasional Waduk Bulango Ulu, Program Pertanian, Proyek Bandar Udara dan Pelabuhan Anggrek untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Gorontalo," sambung Politisi Fraksi Partai NasDem ini yang akan kembali menjadi wakil rakyat dari Dapil Gorontalo untuk periode 2024-2029.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi selepas dari Bandara Djalaludin menuju Kota Gorontalo dan bermalam di sana. Keesokan harinya, Presiden melanjutkan kegiatan meresmikan Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo.







Dialog Multilateral, Redam Konflik di Timur Tengah

nggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya adalah melalui jalur diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral.

Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. "Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan," kata Helmy dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4).

Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung akibat dari harga kebutuhan pokok yang melambung. "Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi,



Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini.

Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah," kata Helmy.

Senada, Anggota Komisi I Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia. Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu.

Maka dari itu, Indonesia dinilai juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.

Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel. Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.

hal/rdn



Perubahan Istilah KKB ke OPM Diharapkan Atasi Konflik di Papua

nggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan mendukung perubahan istilah oleh TNI terkait penamaan kelompok bersenjata di Papua, yaitu yang semula Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sturman menilai karena hal ini menyangkut kedaulatan bangsa Indonesia, sehingga penanganan yang dilakukan menjadi lebih tegas dan jelas dibandingkan dengan KKB.

Meskipun demikian, apapun istilah yang digunakan, penanganan masalah di Papua harus satu visi dan misi. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis, (18/4).

"Berbeda cara mengatasinya. Kalau OPM itu harus dengan kekuatan militer karena sudah menyangkut kedaulatan. Kalau KKB baru sekedar keamanan. (Perbedaan) persepsi ini harus dibedakan. Intinya adalah bagaimana Pemerintah harus satu, mau OPM kerjakan dengan (penanganan) OPM yang benar. Mau KKB, (penanganan) KKB yang benar.

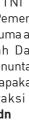


Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan saat kunjungan kerja reses ke Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (18/04/2024).

Sehingga, semua aparat keamanan itu bahu membahu. Tapi kalau OPM lebih jelas, begitu bertindak, berbuat, bersikap dibandingkan dengan KKB," katanya.

Menurut Sturman, jika istilah yang digunakan berbeda, maka dampak yang ditimbulkan pun berbeda. Jika kepolisian menggunakan KKB karena kaitannya dengan keamanan, namun jika TNI harus menggunakan OPM. Mengingat wilayah Indonesia adalah wilayah yang berdaulat. maka TNI bisa bersikap lebih tegas karena persoalan Papua ini harus dituntaskan.

"Ada satu organisasi atau kelompok yang merdeka harus memang kita tuntas habis beda dengan sikap begitu. Jadi harus dibedakan antara OPM dan KKB. Dan tergantung bagaimana Pemerintah menanggapi, tapi intinya harus bahu membahu, gak ada cara lain, pemerintah harus bahu membahu dengan aparat keamanan. Aparat kepolisian dan TNI bahu membahu dan seluruh Pemerintah Daerah juga, tidak cukup cuma aparat kea-manan. Pemerintah Daerah pun punya andil untuk menuntaskan semua apakah itu OPM apakah itu KKB," tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. --- ndy/rdn







Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Harus Terbuka

alam kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama penyelenggara pemilu Provinsi Riau, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menekankan beberapa catatan untuk ditindaklanjuti bersama KPU dan Bawaslu RI. Diantaranya terkait badan Adhoc Pilkada yang harus diseleksi lebih ketat dan terbuka, sehingga tidak terjadi pemilu yang sifatnya transaksional.

"Kemudian, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ini sebagian besar kurang paham tentang teknis perhitungan suara. Oleh karena itu KPU Provinsi harus lebih selektif nantinya dalam menentukan PPK dan PPS nya. Lalu, tentang pelanggaran Pemilu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kami minta kepada KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi ketika dua perkara itu tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU),"



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau. Selasa (23/4/2024).

kata Junimart saat ditemui usai Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4).

Meski demikian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengapresiasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Riau, yang dinilai merupakan salah satu provinsi yang sangat aktif dalam bersinergi dengan penyelenggara Pemilu serta unsur Forkopimda di Provinsi Riau dalam rangka NPHD.

Lebih lanjut, Junimart tetap mengingatkan para penyelenggara pemilu di Provinsi Riau khususnya, untuk terus melakukan sinergi dan sosialisasi terkait tahapan Pemilukada. Karena menurut Junimart, Pemilukada serentak ini akan lebih rumit dibanding dengan pemilu legislatif pada Februari lalu

"Inikan seluruh Indonesia nantinya, dan ini bahkan menurut saya akan lebih capek daripada pemilu kemarin. Karena inikan seluruh kepala daerah di Indonesia. Tentu KPU, Bawaslu, dan pemerintah ha-rus bersinergi, saling visi. Supaya betul-betul pemilukada serentak ini bisa sesuai dengan nafas nasional. Dan tentu harapan kita, tidak ada sengketa-sengketa nantinya," pung-kasnya. ••• we/aha



INIKAN SELURUH INDONESIA NANTI-NYA, DAN INI BAHKAN MENURUT SAYA AKAN LEBIH CAPEK DARIPADA PEMILU KEMARIN. KARENA INIKAN SELURUH KEPALA DAERAH DI INDONESIA. TENTU KPU, BAWASLU, DAN PEMERINTAH HARUS BERSINERGI, SALING VISI. SUPAYA BETUL-BETUL PEMILUKADA SERENTAK INI BISA SESUAI DENGAN NAFAS NASIONAL. DAN TENTU HARAPAN KITA, TIDAK ADA SENGKETA-SENGKETA NANTINYA.



Junimart Girsang

Besarnya Tugas Bidang Datun Kejaksaan di Tengah Kecilnya Anggaran

nggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti soal besarnya tugas dan fungsi (Tusi) Bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan Negeri, khususnya yang ada di Kejaksaan Negeri Lampung. Menurutnya, besarnya Tusi tersebut belum sebanding dengan anggarannya yang masih kecil.

"Dari beberapa kegiatan reses yang kita lakukan, biasanya Datun itu anggarannya paling kecil, padahal fungsi dan tugasnya juga cukup besar, yaitu banyak yang menyelamatkan aset-aset negara," jelas Taufik di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (19/4).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjabarkan beberapa tugas dari Bagian Datun tersebut, di antaranya melakukan pendampingan-pendampingan terhadap program-program strategis negara. Hal itu agar sebelum nanti tiba-tiba muncul



Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Senin (19/4/2024).

tindak pidana maka biasanya didampingi oleh Datun sebelumnya.

"Sehingga, agar tidak ada kesalahan dalam hal tindakan programprogram tersebut. Nah, hanya memang anggarannya sangat kecil. Tadi (berdasarkan informasi) kalau enggak salah hanya berapa miliar

untuk seluruh Lampung, kecil sekali itu," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti banyaknya perkara tindak pidana korupsi di Lampung yang ditangani oleh Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus). Salah satu yang disoroti Komisi III adalah masih banyaknya buronan yang masuk dalam tindak pidana Daftar Pencarian Orang (DPO) namun belum ditangkap hingga kini.

'Maka itu dipertanyakan, kenapa DPO-DPO tindak pidana ini tidak cepat bisa tertangkap. Apakah ada permainan dan lain-lain, itu tadi Pak Benny (Komisi III) yang sampaikan. Tapi, ini kan Kejati juga (dijabat) PLT baru sembilan hari, tapi dari seluruh kinerja sih menurut kami sudah cukup baik, dari paparannya juga cukup bagus," jelasnya. --- rdn



SEHINGGA, AGAR TIDAK ADA KESALAHAN DALAM HAL TINDAKAN PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. NAH, HANYA ME-MANG ANGGARANNYA SANGAT KECIL. TADI (BERDASARKAN INFORMASI) KALAU ENGGAK SALAH HANYA BERAPA MILIAR UNTUK SELURUH LAMPUNG, KECIL **SEKALI ITU.**

Taufik Basari Anggota Komisi III DPR RI



Moratorium Pemidanaan Pengguna Narkoba

omisi III DPR meminta Kepolisian dan Kejaksaan melakukan moratorium terhadap pemidanaan pengguna narkoba. Hal itu disampaikan Komisi III DPR dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (29/4).

"Kita sudah berkunjung ke beberapa negara, nah, kalau di luar negeri pengguna narkoba itu korban. Itu maunya kita di komisi tiga kalau korban itu kita rehabilitasi dengan assessment yang bisa dipertanggungjawabkan," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh usai pertemuan dengan Polisi Daerah (Polda) Kalimantan Selatan dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalsel.



Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (29/4/2024).

Pangeran mengaku prihatin melihat adanya kasus di Polsek Banjarmasin dimana seorang pengguna narkoba dengan barang bukti 0,02 gram atau senilai Rp95.000 yang kemudian ditangkap dan dikenakan pasal 114 UU Narkotika.

"Gara-gara 95 ribu diproses penyidikan, dipidanakan dengan biaya penyidikan 25 juta nah di kejaksaan juga 25 (juta) juga nanti dihukum di atas 5 tahun ini negara rugi. Kalau 0.02 di bawah 1 gram, sepanjang yang bersangkutan itu bukan pengedar atau cuma pemakai itu direhab," imbuh Politisi PAN yang memimpin Kunker Komisi III DPR ke Kalimantan Selatan itu.

Pangeran meminta Polda Kalimantan Selatan menjadi pionir untuk menerapkan kebijakan rehabilitasi untuk pengguna narkotika di bawah 1 gram. Hal tersebut sesuai amanat Presiden Joko Widodo juga yang kerap menyoroti over capacity lembaga pemasyarakatan (LP).



Iuran Pariwisata Tiket Pesawat Berpotensi Langgar **UU Penerbangan**



Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo.

encana pemerintah untuk mengenakan iuran pariwisata kepada penumpang pesawat secara tegas ditolak oleh Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu

dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

"Saya menolak rencana pemerintah menarik iuran pariwisata kepada penumpang pesawat. Selain membebani penumpang karena otomatis akan membuat tarif makin melambung, juga berpotensi melanggar UU, seperti UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan," ujar Sigit dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Rabu (24/4).

Sigit mengatakan berdasar Pasal 126 UU Penerbangan, penetapan tarif penumpang kelas ekonomi dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/tambahan surcharge. Adapun yang dimaksud surcharge adalah biaya yang dikenakan karena ter-dapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan ang-kutan udara di luar penetapan tarif jarak.

"Antara lain biaya fluktuasi harga bahan bakar fuel surcharge dan biaya yang ditanggung oleh perusahaan angkutan udara karena pada saat berangkat atau pulang penerbangan tanpa penumpang, misalnya pada saat hari raya," ungkap Legislator Fraksi PKS ini.

Ditegaskannya, dalam UU Penerbangan sudah jelas bahwa penetapan tarif tiket pesawat terdiri dari empat komponen yaitu tarif jarak, pajak, asuransi dan tuslah. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa iuran pariwisata yang akan diterapkan Pemerintah jelas tidak termasuk pajak yang bisa dibebankan kepada penumpang dalam tarif tiketnya.

"Pajak dan luran itu maknanya sudah berbeda jauh. Dan didalam UU penerbangan sendiri tidak ada terminologi iuran pariwisata. Pemerintah jangan konyol karena ini jelas berpotensi melanggar UU," pungkas Sigit. pun/aha







ASDP Harus Tambah Dermaga di Penyeberangan Merak-Bakauheni



Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama.

nggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyoroti kemacetan pada lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni saat musim mudik 2024 kemarin. Hal itu terjadi akibat infrastruktur dermaga tidak memadai, sehingga olah gerak kapal feri amat terbatas. Oleh karena itu, SJP

sapaan akrabnya, mendesak ASDP segera menambah jumlah dermaga yang masih kurang, di mana saat ini hanya tersedia 7 (tujuh) buah dermaga.

Di sisi lain, selain penambahan dermaga dan kapal, SJP juga mendorong perbaikan manajemen lalu lintas penyeberangan di Merak-Bakauheni. "Dan juga pelabuhan lainnya yang dikelola ASDP seperti Ketapang dan Gilimanuk secara menyeluruh," usul Legislator Dapil NTB 1 tersebut sebagaimana keterangan yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4).

"Saya juga mengapresiasi Kemenhub yang berencana menambah lebih dari 1.000 kapal untuk mengantisipasi kepadatan dermaga, tapi sebaiknya penambahan kapal itu juga disertai perbaikan manajemen atau pengelolaannya," imbuh Politisi Fraksi PKS ini.

Saat ini, ungkapnya, pengelolaan dermaga atau operator terminal penyeberangan yang ada di Merak-Bakauheni sekaligus juga pengelolaan kapal penyeberangan atau operator feri dilakukan oleh ASDP. "Jika ASDP tidak dapat mengelolanya, maka dampaknya jadi sangat besar karena berada di tangan yang sama," tegas SJP.

Sebagaimana diketahui, lintasan penyeberangan dan kapal-kapal penyeberangan yang melayaninya berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Namun, di sisi lain, urusan kapal berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan

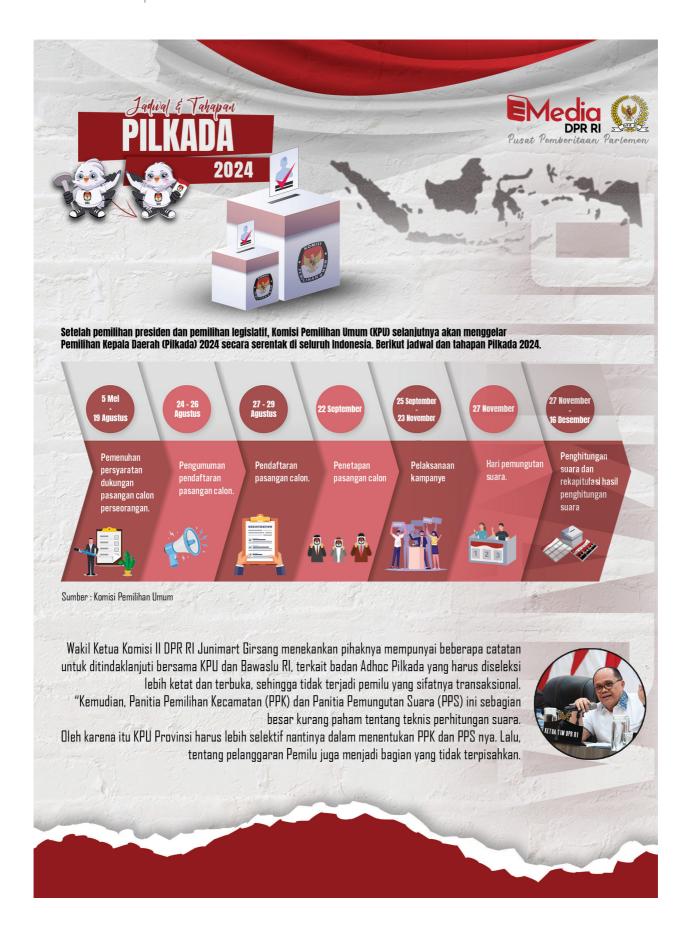
Terpantau saat memasuki H-3 Lebaran kemarin, antrean kendaraan masih terjadi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Minggu (7/4/2024). Antrean kendaraan di Pelabuhan merak terpantau hingga 18 km. Antrean tersebut terjadi mulai dari fly over merak hingga gerbang tol merak sejauh 5,7 km. Lalu dari gerbang tol merak hingga Km 87 arah Merak sejauh 13 km. pun/rdn



SAYA JUGA MENGAPRESIASI KE-MENHUB YANG BERENCANA MENAMBAH LEBIH DARI 1.000 KAPAL UNTUK MENGANTISIPASI KEPADATAN DERMAGA, TAPI SEBAIKNYA PENAMBAHAN KAPAL ITU JUGA DISERTAI PERBAIKAN MANAJEMEN ATAU PENGELOLAANNYA.



Suryadi Jaya Purnama





BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali



Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar.

royek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). "Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masya-rakatnya secara ekonomi semakin menurun," ucapnya.

Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lainlain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.

Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menik-mati proyek strategis nasional itu.

"Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati," seru Politisi PKB ini.

mh/aha



PELIBATAN MASYARAKAT HARUS OPTIMAL. MASYARAKAT JANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI KORBAN ATAU TIKUS MATI DI LUMBUNG PADI. JANGAN SAMPAI **BALI GO INTERNATIONAL TAPI MASYARAKATNYA** SECARA EKONOMI SEMAKIN MENURUN.



Siti Mukaromah

Sinergi PLN dan Antam Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter

nggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto menilai proyek smelter yang semestinya sudah bisa berproduksi itu kini mengalami kemandekan proyek akibat kurangnya suplai listrik. Oleh karena itu, tegasnya, sinergi antar-BUMN harus satu visi dan memiliki rasa kepemilikan bersama (sense of belonging) yang tinggi. Sehingga, ketika ada satu BUMN yang dihadapkan pada persoalan tertentu harus ada satu BUMN yang bisa membantu dan harusnya bersinergi.

"Salah satu yang paling memungkinkan adalah bekerjasama dengan PLN. Karena PLN menjadi penyedia listrik di Indonesia yang sudah siap dengan segala sesuatunya. Ketika ini terjadi kerja sama dengan PLN ya mudah-mudahan masalah (kurangnya suplai listrik) ini bisa segera teratasi," kata Bambang



Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto saat mengikuti pertemuan Komisi VII DPR RI dengan PT Antam dalam rangka Kunjungan Kerja Reses, di Manado, Sulut, Kamis (18/4/2024).

Hermanto kepada Parlementaria di Manado, Sulut, Kamis (18/4).

Sehingga, dengan adanya pertemuan ini, Politisi Fraksi Partai Golkar itu berharap mendapatkan solusi dari persoalan yang dialami PT Antam, yaitu mendorong PLN untuk bisa membantu agar smelter feronikel di Halmahera timur bisa berproduksi. "Mendengar apa yang disampaikan oleh Antam bahwa karena suatu hal yang tidak bisa terpenuhi yang akhirnya sampai hari ini mangkrak semua," terangnya.

la pun menyoroti ketika ada industri yang akan membangun smelter apapun kondisinya, maka ketersediaan listrik (power supply) semestinya menjadi tahapan awal. Namun, yang sekarang terjadi, semua infrastruktur sudah terbangun tapi sumber energi listriknya belum, sehingga akhirnya saat ini smelter belum bisa diproduksi. --- afr/rdn



SALAH SATU YANG PALING MEMUNGKINKAN ADALAH BEKERJASAMA DENGAN PLN. KARENA PLN MENJADI PENYEDIA LISTRIK DI INDONESIA YANG SUDAH SIAP DENGAN SEGALA SESUATUNYA. KETIKA INI TERJADI KERJA SAMA DENGAN PLN YA MUDAH-MUDAHAN MASALAH (KURANGNYA SUPLAI LISTRIK) INI BISA SEGERA TERATASI.

Bambang Hermanto



Pertanyakan Keseriusan Target EBT 2025

nggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan peta jalan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada tahun 2025 nanti dengan bauran target 23%. Sementara per tahun ini bauran EBT diperkirakan masih sekitar 12%.

"Kami pertanyakan keseriusan itu. Sebab dari kunjungan kami (Komisi VII) ke PT Bukit Asam Tbk (PTBA) telah melakukan kerja sama dengan perusahaan China membangun PLTU berbasis batu bara," ujar Yuliani ditemui usai kunjungan ke dermaga PTBA di Palembang, Rabu (17/4).

Hal tersebut dinilai akan menjauhkan target pemerintah dalam meningkatkan EBT dan mengurangi emisi karbon. Dimana Indonesia bersama pemimpin-pemimpin berbagai negara dunia telah sepakat



Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris.

mengurangi pemakaian energi fosil seperti batu bara dalam COP28.

"Belum lagi nanti ada carbon trading (perdagangan karbon), itu artinya akan ada pembayaran

bagi industri yang mengeluarkan karbon dari sumber energinya. Jadi kami pertanyakan kembali bagaimana keseriusan pemerintah dalam menerapkan target EBT ini?" ungkap Yuliani.

Dengan kunjungan ke produsen batu bara yang memasok PLTU di Sumatera Selatan kali ini, Politisi Fraksi PAN ini berpandangan pembangkit listrik non EBT masih banyak. Ia berharap ada kejelasan databsoal progres jumlah pembangkit EBT yang sudah beroperasi.

'Saya juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi misalnya tertulis pembangkit ini yang akan dibangun oleh PLN menggunakan EBT," katanya. Ia memperingatkan agar targettarget yang dicanangkan jangan hanya sebatas di atas kertas saja, namun realisasinya harus jelas.

--- aha

KAMI PERTANYAKAN KESERIUSAN ITU. SEBAB DARI KUNJUNGAN KAMI (KOMISI VII) KE PT BUKIT ASAM TBK (PTBA) TELAH **MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PERUSAHAAN CHINA MEMBANGUN PLTU BERBASIS BATU BARA.** Andi Yuliani Paris

Penguasa Jangan Hanya Berdiri di Sisi Pengusaha

nggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan pemerintah harus memberi ruang dan kesempatan luas bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasinya pada momentum May Day yang jatuh setiap 1 Mei.

"May Day merupakan momentum yang tepat bagi seluruh pekerja untuk menyampaikan aspirasinya. Pemerintah harus memberi ruang dan kesempatan luas pada kaum pekerja yang ingin memanfaatkan momen tersebut," ujar Netty dalam keterangan media, Rabu, (1/5).

Menurut Netty, penetapan 1 Mei sebagai hari libur merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kaum pekerja yang telah berkontribusi dalam pembangunan di berbagai sektor.

"Biarkan para pekerja menjadikan May Day sebagai panggung demokrasi untuk menyampaikan tuntutannya. Aparat terkait tinggal melakukan pengawalan agar kegiatan tersebut berjalan lancar dan aman," katanya.



Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.

Lebih lanjut Netty menyampaikan, saat ini kondisi mayoritas kaum pekerja masih memprihatinkan. "Mayoritas pekerja di Indonesia masih jauh dari sejahtera. Upah yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang makin besar. Belum lagi terkait jaminan keamanan dan

keselamatan kerja yang belum ideal dengan risiko pekerjaan yang kadang taruhannya nyawa," tambah Netty.

Karenanya, Legislator Fraksi PKS itu mendesak pemerintah agar mendengarkan masukan dan tuntutan dari para pekerja yang selalu disuarakan setiap tahunnya. "Dengarkan tuntutan buruh dengan sepenuh hati," katanya.

Pemerintah harus dapat bertindak sebagai pengayom dan pembina yang berempati dan berpihak pada pekerja dalam hubungan industrialis. Jangan sampai pekerja merasa bahwa pemerintah hanya berdiri di sisi pengusaha dan abai terhadap para pekerja. Keadilan dan kesetaraan harus juga dirasakan oleh kaum pekerja," kata Netty.



PEMERINTAH HARUS DAPAT BER-TINDAK SEBAGAI PENGAYOM DAN PEMBINA YANG BEREMPATI DAN BERPIHAK PADA PEKERJA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIALIS. JANGAN SAMPAI PEKERJA MERASA BAHWA PEMERINTAH HANYA BERDIRI DI SISI PENGUSAHA DAN ABAI TERHADAP PARA PEKERJA. KEADILAN DAN KESETARAAN HARUS JUGA DIRASAKAN OLEH KAUM PEKERJA.

Netty Prasetiyani Aher

rnm/aha



Kenaikan BI-Rate, Antisipasi yang Baik Pelemahan Rupiah

ilai tukar rupiah beberapa hari ini sangat mengkhawatirkan karena terus melemah, bahkan menembus Rp16.200 per dolar Amerika Serikat. Merespon antisipasi anjloknya rupiah ini, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menilai kenaikan suku bunga (BI-Rate) Bank Indonesia (BI) merupakan langkah antisipasi yang baik.

"Saya lihat Indonesia masih cukup kuat, stabil, cadangan devisa cukup bagus dan juga BI sudah melakukan antisipasi kenaikan suku bunga kemarin," ungkap Fathan saat memimpin kunjungan kerja reses di Semarang, Jawa Tengah, Senin (28/4).

Diketahui Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur 5 (RDG) pada 23-24 April 2024 telah memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen, suku bunga *Deposit* Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan saat memimpin kunjungan kerja reses di Semarang, Jawa Tengah.

menjadi 7,00 persen. Kenaikan suku bunga ini diupayakan dapat memperkuat stabilitas nilai tukar

Rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability.

"Saya kira memang ini harus diwaspadai karena kita nggak tahu sampai kapan terjadi perang antara Israel dan Iran. Tapi kita akan terus berkolaborasi dengan pemerintah dan DPR akan terus memantau sehingga kita mencapai tahap yang maksimal," pungkas Politisi Fraksi PKB itu. qal/rdn



SAYA KIRA MEMANG INI HARUS DIWASPADAI KARENA KITA NGGAK TAHU SAMPAI KAPAN TERJADI PERANG ANTARA ISRAEL DAN IRAN. TAPI KITA AKAN TERUS BERKOLABORASI DENGAN PEMERINTAH DAN DPR AKAN TERUS MEMANTAU SEHINGGA KITA MENCAPAI TAHAP YANG MAKSIMAL.





Stop Pemborosan Negara, **Tutup BUMD yang Tak** Beraktivitas Lagi

nggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat menutup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah tak beroperasi lagi. Hal ini ia kemukakan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jawa Timur (Jatim) melakukan pemeriksaan di daerah tersebut.

Hasilnya, dari 120 lebih BUMD di Jatim, tak lebih dari 5 perusahaan yang masih berjalan. "Sedangkan sisanya seperti hidup segan, mati tak mau. Yang seperti ini tak boleh dibiarkan begitu saja. Bayangkan mereka (BUMD) itu dibiayai negara tiap tahunnya," ujar Marinus di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/4).

Menurut Politisi PDI-Perjuangan ini, ada potensi pemborosan uang negara hingga ratusan miliar dari alokasi dana bagi BUMD yang setiap entitasnya paling tidak bisa memperoleh dana setidaknya Rp5 miliar. "Ini kan pemborosan. Katakanlah di Jatim ini ada 100 BUMD



Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea saat pertemuan dengan BPKP, BPK RI dan perwakilan Kemenkeu di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/4/2024).

yang tidak operasional lagi, berapa banyak dana yang terpakai sia-sia seperti itu?" ungkap Marinus.

Padahal, ia berujar, dana yang tak efektif itu dapat disalurkan ke sektor yang lebih tepat. "Dana itu bisa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur juga ekonomi kita, supaya berdampak bagi masyarakat luas," katanya.

Lebih lanjut, Legislator Dapil Banten III ini menyebutkan sebenarnya 'penyakit' BUMD seperti ini juga menjangkit di banyak provinsi. Misalnya, akibat pergantian pemimpin daerah yang tak sevisi dengan pemimpin sebelumnya, menyebabkan BUMD yang sudah eksis di periode sebelumnya tak berlanjut lagi karena perbedaan visi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Nah ini yang harus tegas ditegakkan. Kalau ada temuan dari hasil pemeriksaan seperti ini, pemerintah terkait harus tegas. Kalau tidak layak, maka langsung tutup saja BUMD nya. Tinggal perintah saja," pungkas Marinus. --- aha



KALAU ADA TEMUAN DARI HASIL PEMERIKSAAN SEPERTI INI, PEMERINTAH TERKAIT HARUS TEGAS. KALAU TIDAK LAYAK, MAKA LANGSUNG TUTUP SAJA **BUMD NYA. TINGGAL PERINTAH SAJA.**

Marinus Gea



Legislator Dorong Pembaruan Sistem Data RS Grestelina Makassar

etua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menekankan pentingnya pembaruan dan peningkatan sistem basis data di Rumah Sakit Grestelina Makassar. Dalam kunjungan terbarunya, BURT menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur data guna memastikan bahwa pelayanan di rumah sakit tersebut sesuai dengan standar yang diinginkan.

"Ini menjadi perhatian dari seluruh pemangku kepentingan khususnya Jasindo dan rumah sakit *provider* untuk kembali terus ditingkatkan dan diperbarui lagi data base-data base yang ada. Sehingga kedepannya dapat memberikan pelayanan di rumah sakit umum bahwa ini adalah yang berhak atas kartu tersebut dan Jasindo pun juga akan mudah mengawasinya," ujar Agung Budi Santoso kepada Parlementaria di sela-sela agenda Kunjungan Kerja BURT ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (25/4).



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat memimpin Kunjungan Kerja BURT ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (25/4/2024).

Pembaharuan dan peningkatan basis data, diharapkan persoalan terkait kartu, kelas kamar, dan obat-obatan yang di-cover dapat ditangani dengan lebih baik. Dengan demikian, pasien akan mendapatkan pelayanan yang lebih lancar dan

efisien sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Menurut saya fasilitas yang ada di Rumah Sakit Grestelina Makassar ini sudah cukup layak, karena kelas Suite ini cukup bagus dan besar ruangannya ada untuk ruang tunggu pasien, dan ruang yang menjaga pasien. Saya kira ini sudah jadi standar rumah sakit yang kelas B, karena Grestelina ini masih kelas B," ungkapnya.

Ke depan diharapkan Rumah Sakit Grestelina terus berkembang dan memenuhi standar serta target yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang terbaik. Adapun fasilitas Hemodialisis menjadi salah satu unggulan dari rumah sakit ini untuk pasien yang membutuhkan perawatan cuci darah. --- upi/aha



INI MENJADI PERHATIAN DARI SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN KHUSUSNYA JASINDO DAN RUMAH SAKIT PROVIDER UNTUK KEMBALI TERUS DITINGKATKAN DAN DIPERBARUI LAGI DATA BASE-DATA BASE YANG ADA. SEHINGGA KEDEPANNYA DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM BAHWA INI ADALAH YANG BERHAK ATAS KARTU TERSEBUT DAN JASINDO PUN JUGA AKAN MUDAH MENGAWASINYA.



RS Columbia Asia BSD Kelas B Jadi Rujukan Program **Jamkestama**

adan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Rumah Sakit (RS) Columbia Asia di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Banten. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti menjelaskan di wilayah BSD terdapat 20 rumah sakit namun hanya ada dua yang berkelas B, termasuk rumah sakit

Novita menilai RS ini dapat menjadi rujukan untuk menjadi peserta Jamkestama, khususnya bagi para Anggota DPR beserta keluarganya.

"Kita melihat banyak sekali pasien yang ditangani dengan baik, baik yang level (ekonomi kelas)



Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ke Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Tanggrang Selatan, Banten, Rabu (03/04/2024).

atas maupun yang menggunakan BPJS dan masyarakat yang bawah. Semuanya diterima dengan baik dengan pelayanan yang baik Serta dokter-dokter yang mumpuni," jelasnya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik BURT DPR RI ke Rumah Sakit Columbia Asia BSD, Tangerang Selatan, Banten, Rabu. (3/4)

Novita juga menyoroti fasilitas Rumah Sakit Columbia Asia BSD yang cukup lengkap. Disampaikannya, berdasarkan presentasi yang dipaparkan dari pihak RS, bahwa dalam satu tahun ke depan akan ada penambahan fasilitas peralatan, dokter, hingga kamar karena hal itu karena menjadi syarat yang mesti dicapai oleh Rumah Sakit tipe B.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga merekomendasikan RS Columbia Asia ini agar menerima segala jenis pasien yang berobat. Tak terkecuali masyarakat pengguna BPJS dapat pula diterima dengan baik di RS ini. mri/rdn







BKSAP Dorong Partisipasi Parlemen Papua Nugini Sukseskan 'The Second IPPP'

akil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mendorong partisipasi parlemen Papua Nugini untuk menyukseskan forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) Kedua, serta turut terlibat dalam memperkuat hubungan antar negara Kawasan Pasifik.

"Dukungan di forum parlemen sangat penting bagi hubungan kita dan tadi sudah sampaikan undangan resminya, lalu mereka berkomitmen untuk hadir dan menyukseskan The Second IPPP. Kita berharap mereka turut mengkomunikasikannya dengan negara-negara kawasan pasifik melalui pacific island forum yang mereka miliki," ujar Putu usai memimpin pertemuan bilateral di Museum Rudana, Ubud, Bali, Senin (29/4).

Lebih lanjut Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan,



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana saat memimpin pertemuan bilateral di Museum Rudana, Ubud, Bali, Senin (29/4/2024).

BKSAP DPR RI bersama parlemen Papua Nugini terus berusaha untuk meningkatkan kerjasama bilateral diantaranya peningkatan kapasitas dan pertukaran kunjungan, melalui nota kesepahaman (MoU) yang bermakna antara kedua parlemen.

"Kami juga mengapresiasi dukungan Papua Nugini terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang harus selalu kita jaga dan pertahankan," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Deputy Speaker Parlemen Papua Nugini Koni Iguan mengungkapkan rasa terima kasih terhadap penerimaan atas kunjungan delegasi parlemen Papua Nugini di Bali. Ia berharap ke depan Indonesia dan Papua nugini dapat terbuka dalam menjalin kerjasama diantaranya pertukaran program, pertukaran bisnis dan juga ekonomi."



untuk berita selengkapnya

🗫 tra/aha

Kiat Sukses di Era Transformasi Digital untuk Gen Z

alam kuliah umum program Magang Di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar Indra menyampaikan generasi z (gen z) mempunyai tantangannya tersendiri dalam menghadapi era transformasi digital. Ia mengungkapkan salah satu syarat yang diperlukan oleh gen z agar sukses dalam era ini ialah mempunyai visi yang jelas dengan dilengkapi dengan strategi untuk mencapainya.

"Sangatlah penting untuk mengkomunikasikan visi ini secara terbuka kepada dalam berorganisasi, memungkinkan semua pihak untuk memahami peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Memanfaatkan teknologi mutakhir dapat mengurangi waktu dan upaya yang kita lakukan dalam mencapai tujuan. Selain bekerja keras, perlu untuk bekerja secara efisien dan efektif, memaksimalkan produktivitas kita," terangnya di Gedung Nusantara, Senin (29/4).



Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar Indra dalam kuliah umum program Magang Di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI 2024, di Gedung Nusantara, Senin (29/4/2024).

Lebih lanjut, poin penting sebagai syarat kepemimpinan di era digital kata Indra, adalah perilaku integritas, adaptif dan fleksibel. Menurutnya, pemimpin yang adaptif dan fleksibel dapat mengatasi tantangan dengan lebih baik, memimpin tim melalui perubahan, dan menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan responsif.

"Mulailah dari mana Anda berada, gunakan apa yang Anda miliki, lakukan apa yang Anda bisa. Keajaiban terjadi ketika Anda berusaha lebih keras setiap hari, berani melakukan sesuatu yang baru, dan menerima ketidakpastian," sambungnya.

Poin akhir syarat kepemimpinan di era digital menurut Indra ialah, perihal pembelajaran dan pengembangan. Indra menjelaskan seorang pemimpin tidak hanya berpikir tentang dirinya. Tapi bagaimana organisasi sukses dan bertahan menghadapi zaman. Para pemimpin belajar terus menerus dan mengembangkan gagasan.



MULAILAH DARI MANA ANDA BERADA, GUNAKAN APA YANG ANDA MILIKI, LAKUKAN APA YANG ANDA BISA. KEAJAIBAN TERJADI KETIKA ANDA BERUSAHA LEBIH KERAS SETIAP HARI, BERANI MELAKUKAN SESUATU YANG BARU, DAN MENERIMA KETIDAKPASTIAN. Indra Iskanda

⊳ we/aha



Sekretariat Parlemen Korsel Pelajari Proses Legislasi ke **PUU DPR RI**

usat Perancangan Undang-Undang (PUU) Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI secara resmi menerima kunjungan Sekretariat Parlemen Korea Selatan dalam rangka ingin mempelajari proses legislasi yang ada di Parlemen Indonesia. Merespon hal itu, Kepala PUU Badan Keahlian DPR RI Lidya Suryani Widayati menerangkan proses perancangan RUU yang ada di Indonesia diantaranya memiliki proses adanya tahap Naskah Akademik yang memuat landasan filosofis, sosiologis hingga yuridis.

"Tadi hasil diskusi kita baru tahu ternyata mereka itu setiap perancangan Undang-Undang tidak menggunakan Naskah Akademik. Jadi Indonesia justru lebih perfect, karena setiap RUU perlu disertai dan wajib ada Naskah Akademik," ungkap Lidya saat diwawancarai Parlementaria usai pertemuan di Ruang PUU Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Lidya juga menjelaskan bahwasanya DPR RI memiliki metode omnibus law dan pengaturan berupa



Kepala PUU Badan Keahlian DPR RI Lidya Suryani Widayati (kanan) saat bertukar cenderamata usai menerima kunjungan Sekretariat Parlemen Korea Selatan di Senayan, Senin (29/4/2024).

carry over sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 yang mana aturan tersebut belum dimiliki oleh Sekretariat Parlemen Korea Selatan.

Pada pertemuan tersebut Sekretariat Parlemen Korea Selatan dipimpin oleh Ryu Seungwoo selaku 'Deputy Director General of Social

and Cultural Legislation'. Selain menerima informasi terkait prosedur legislasi, Ryu Seungwoo juga sempat bertanya terkait upaya dan inisiatif yang telah dilakukan oleh DPR RI dalam mengatasi berbagai isu terkini. Salah satunya dalam sektor lingkungan hidup. --- pun/aha











Kunjungan kerja Tim Komisi VII DPR RI ke Dermaga Kertapati PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di Palembang, Rabu (17/4/2024). Perusahaan pelat merah ini diperkirakan masih menyimpan cadangan batu bara hingga puluhan tahun. FOTO: AHA



















